



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan target kegiatan Padat Karya Infrastruktur pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2015-2019, perlu dilakukan perubahan atas nilai paket dan jumlah lokasi kegiatan padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri pada dana tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1738);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1738) diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 479

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NPS 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri	56.000.000
	Padat Karya Infrastruktur	27.730.000
	Total	83.730.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24

TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
	WILAYAH BARAT				
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi	3	210.000	-	-
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	10	700.000	-	-
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang	3	210.000	-	-
4.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	10	700.000	5	550.000

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka	6	420.000	-	-
6.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	3	210.000	-	-
7.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	9	630.000	4	440.000
8.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	3	210.000	-	-
9.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang	3	210.000	-	-
10.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	3	210.000	-	-
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak	3	210.000	-	-
12.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen	3	210.000	-	-
13.	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	3	210.000	-	-
14.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Karanganyar	3	210.000	-	-
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul	3	210.000	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
16.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang	3	210.000	-	-
17.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek	3	210.000	-	-
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso	10	700.000	4	440.000
19.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	3	210.000	-	-
20.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo	3	210.000	-	-
21.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk	3	210.000	-	-
22.	Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen	9	630.000	4	440.000
23.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	3	210.000	-	-
24.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam	3	210.000	-	-
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie	3	210.000	-	-
26.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Sabang	3	210.000	-	-
27.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir	3	210.000	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
28.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah	3	210.000	-	-
29.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas	3	210.000	-	-
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	3	210.000	-	-
31.	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga	3	210.000	-	-
32.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan	3	210.000	-	-
33.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	3	210.000	-	-
34.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu	3	210.000	-	-
35.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir	3	210.000	-	-
36.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi	4	280.000	2	220.000
37.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang	3	210.000	-	-
38.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ogan Ilir	3	210.000	-	-
39.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat	12	840.000	9	990.000

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
40.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji	12	840.000	5	550.000
41.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur	12	840.000	5	550.000
42.	Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu	3	210.000	-	-
43.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah	8	560.000	4	440.000
44.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan	3	210.000	-	-
45.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong	3	210.000	-	-
46.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang	10	700.000	4	440.000
47.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Muko Muko	7	490.000	1	110.000
48.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lebak	3	210.000	-	-
49.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan	3	210.000	-	-
50.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	12	840.000	8	880.000
51.	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara	3	210.000	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
52.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas	11	770.000	5	550.000
53.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau	3	210.000	-	-
54.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser	3	210.000	-	-
55.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan	3	210.000	-	-
56.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya	10	700.000	4	440.000
57.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang	9	630.000	4	440.000
58.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi	6	420.000	2	220.000
59.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo	8	560.000	4	440.000
60.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue	11	770.000	4	440.000
61.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung	9	630.000	2	220.000
62.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Agam	9	630.000	4	440.000

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
63.	Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	10	700.000	5	550.000
64.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga	5	350.000	1	110.000
65.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari	9	630.000	2	220.000
66.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu	11	770.000	4	440.000
67.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	10	700.000	4	440.000
68.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat	9	630.000	4	440.000
69.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar	10	700.000	2	220.000
70.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	10	700.000	2	220.000
	WILAYAH TENGAH				
71.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan	3	210.000	-	-
72.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe	3	210.000	-	-
73.	Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon	3	210.000	-	-
74.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara	3	210.000	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
75.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong	10	700.000	4	460.000
76.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala	5	350.000	2	230.000
77.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una	3	210.000	-	-
78.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	9	630.000	4	460.000
79.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanatoraja	3	210.000	-	-
80.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai	9	630.000	4	460.000
81.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	9	630.000	4	460.000
82.	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jeneponto	-	-	4	460.000
83.	Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar	10	700.000	4	460.000
84.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba	10	700.000	4	460.000
85.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	10	700.000	4	460.000

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
86.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang	3	210.000	-	-
87.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan	12	840.000	5	575.000
88.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara	3	210.000	-	-
89.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe	8	560.000	8	920.000
90.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana	12	840.000	4	460.000
91.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur	10	700.000	2	230.000
92.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna	10	700.000	2	230.000
93.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Utara	10	700.000	4	460.000
94.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan	3	210.000	-	-
95.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah	6	420.000	2	230.000

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
96.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene	10	700.000	4	460.000
97.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu	3	210.000	-	-
98.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju	3	210.000	-	-
99.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa	8	560.000	6	690.000
100.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur	3	210.000	-	-
101.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	3	210.000	-	-
102.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo	10	700.000	2	230.000
103.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara	10	700.000	2	230.000
104.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo	10	700.000	5	575.000
105.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwatu	10	700.000	4	460.000
106.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng	10	700.000	4	460.000

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
107.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Kendari	8	560.000	-	-
108.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah	7	490.000	2	230.000
109.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pare-Pare	10	700.000	4	460.000
	WILAYAH TIMUR				
110.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Buru	10	700.000	5	600.000
111.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah	3	210.000	-	-
112.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat	3	210.000	-	-
113.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Morotai	3	210.000	-	-
114.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan	10	700.000	5	600.000
115.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur	3	210.000	-	-
116.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat	3	210.000	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
117.	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan	10	700.000	8	960.000
118.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah	10	700.000	5	600.000
119.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	10	700.000	3	360.000
120.	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Manggarai Barat	10	700.000	3	360.000
121.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka	3	210.000	-	-
122.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang	3	210.000	-	-
123.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu	3	210.000	-	-
124.	Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura	3	210.000	-	-
125.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong	3	210.000	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA MANDIRI		PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	
		Paket	Jumlah (Rp)	Paket	Jumlah (Rp)
			(Rp.000)		(Rp.000)
126.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur	10	700.000	3	360.000
127.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya	10	700.000	3	360.000
128.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan	10	700.000	4	480.000
129.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka	10	700.000	3	360.000
TOTAL		800	56.000.000	244	27.730.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001